

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen et al., (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori bahwa prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda. Situasi dengan ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) dapat muncul ketika agen dan principal saling berinteraksi satu sama lain, karena pada dasarnya agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan prinsipal (Richardson, 1998). Kondisi tersebut memberikan kesempatan pada agen untuk menggunakan informasi yang telah diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya (Wulandari & Muliarta, 2019).

Teori agensi mengasumsikan bahwa adanya asimetris informasi dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (Juanda & Lamury, 2021) Prinsipal merupakan pemegang saham yang menginginkan laporan keuangan dari perusahaan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, prinsipal mempekerjakan seorang agen yang merupakan manajemen dalam memperhatikan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan perusahaan tersebut. Manajemen memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada prinsipal. Namun, jika manajemen menyampaikan informasi tersebut langsung kepada prinsipal, akan dapat menimbulkan adanya kecurangan. Sehingga, untuk menghindari tersebut agar prinsipal mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang perusahaan, dibutuhkan adanya pihak ketiga yang merupakan auditor eksternal untuk menyampaikan kondisi kelangsungan hidup perusahaan atau *going concern* tersebut.

2.2. Opini Audit *Going Concern*

2.2.1 Pengertian Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* merupakan opini yang diberikan auditor atas laporan keuangan klien jika dalam pemeriksaan terdapat keraguan substantial mengenai kemampuan perusahaan klien untuk melanjutkan usaha sebagai *going concern* (Huda et al, 2021). Berdasarkan SPAP SA 570 (2021), salah satu tujuan auditor ialah memperoleh bukti yang

cukup, tepat dan akurat, serta menyimpulkan bahwa ketepatan penggunaan basis akuntansi terhadap kelangsungan usahanya dari manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Opini audit *going concern* adalah opini modifikasi dari opini yang telah ada yang diberikan oleh auditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan hidupnya. Pemberian opini audit pada laporan auditor independen sangat penting bagi pengguna laporan keuangan terutama pihak investor dalam menentukan keputusan investasi. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit, auditor sebagai pihak independen yang mewakili kepentingan pemegang saham dan manajemen harus memperhatikan *going concern* perusahaan (Dewi & Premashanti, 2020). Terdapat dua hal yang menjadi penyebab munculnya opini *going concern* (Karjono *et al*, 2021).

1. Adanya masalah *self fulfilling prophecy* yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status *going concern* yang muncul, sehingga membuat auditor khawatir bahwa opini *going concern* yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Meskipun demikian, penilaian opini *going concern* harus tetap diungkapkan dengan harapan dapat mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang terganggu.
2. Prosedur penentuan status *going concern* tidak terstruktur.

Menurut Tan *et al* (2020) banyak hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, kualitas audit, keragaman gender pada direksi, keragaman gender pada dewan komisaris, dan keragaman gender pada komite audit. Menurut Gulo *et al* (2021) faktor eksternal dapat dikaitkan dengan kondisi perekonomian tingkat persaingan kondisi sosial, politik, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan auditor, seperti kualitas audit (*audit quality*), masa kerja audit (*audit tenure*). Sedangkan dari faktor internal dikaitkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki perusahaan agar mampu membayar hutang-hutangnya dan meningkatkan penjualannya agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat secara terus-menerus.

2.2.2 Faktor Pemberian Opini Audit *Going Concern*

Dalam SPAP SA 570 (2021) menyatakan bahwa terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya antara lain sebagai berikut:

- a. Keuangan:
 - 1. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
 - 2. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.
 - 3. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur.
 - 4. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis.
 - 5. Rasio keuangan utama yang buruk.
 - 6. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.
 - 7. Dividen yang sudah lama terhutang atau yang tidak berkelanjutan.
 - 8. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.
 - 9. Ketidakmampuan untuk mematuhi ketentuan perjanjian pinjaman.
 - 10. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman.
 - 11. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.
- b. Operasi:
 - 1. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.
 - 2. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.
 - 3. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama.
 - 4. Kesulitan tenaga kerja.
 - 5. Kekurangan penyediaan barang/bahan.
 - 6. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.
- c. Lain-lain:
 - 1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori atau regulatori lainnya, seperti ketentuan solvabilitas atau likuiditas bagi institusi keuangan.
 - 2. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.
 - 3. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.

4. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

Menurut PSA No. 30 SA Seksi 341 ketika memberikan opini audit *going concern*, kondisi berikut dapat dipertimbangkan:

1. Trend negatif, contohnya, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang buruk.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
3. Masalah intern, sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan, namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

2.2.3 Jenis-jenis Opini Audit

Menurut Aurellia (2022) opini audit terdiri dari 5 macam, yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan data secara real dan wajar. Penyusunan opini audit ini harus dipastikan bahwa laporan keuangan lengkap, tiga standar umum telah dipenuhi, bukti yang cukup telah diakumulasi, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), dan tidak ada celah untuk laporan harus dimodifikasi.
2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)
Keadaan tertentu membuat auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat

ini jika terdapat kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP serta auditor ingin menekankan suatu hal.

3. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di seluruh Indonesia, kecuali dampak dari hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Opini tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan yang tidak benar-benar menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Opini tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Opini tidak memberikan pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini diberikan ketika auditor merasa tidak puas dengan setiap laporan keuangan yang disajikan

2.3. Kualitas Audit

2.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Auditor berkualitas tinggi sering diasumsikan mampu mencegah dan mengurangi praktik-praktik akuntansi yang dipertanyakan dan melaporkan kesalahan-kesalahan serta ketidakteraturan yang material daripada auditor berkualitas rendah (Juanda & Lamury, 2021). Apabila klien mengalami masalah dalam mempertahankan kehidupan usahanya maka auditor yang memiliki kualitas tinggi akan cenderung mengeluarkan opini *going concern*-nya (Effendi, 2019). Oleh karena itu ketika perusahaan diaudit oleh auditor yang berkualitas maka perusahaan yang berisiko dalam melakukan praktik-praktik akuntansi yang dipertanyakan akan semakin besar kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

Kualitas audit adalah kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan tentang pelanggaran sistem akuntansi kliennya (Hamid & Fidiana, 2020). Laporan keuangan yang telah di audit dipandang berkualitas tinggi, relevan, dapat dipercaya karena dihasilkan dari auditor yang berkualitas. Kualitas audit yang baik akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan. Menurut Effendi (2019) auditor dengan skala besar memiliki insentif untuk mendeteksi dan melaporkan masalah *going concern* kliennya. Seringkali perusahaan

menggunakan jasa auditor atau KAP yang memiliki reputasi yang baik untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas, KAP yang mempunyai reputasi tinggi mampu menerapkan standar mutu audit yang tinggi karena memiliki independensi dan kompetensi yang baik.

KAP dikategorikan menjadi 2, yaitu KAP *big four* dan *non big four*. Menurut Athallah (2022) KAP *big four* mempunyai afiliasi dengan KAP di Indonesia diantaranya:

- a. Deloitte Touche Tohmatsu yang bermitra dengan Osman, Ramli, Satrio dan Rekan.
- b. Price Waterhouse Coopers (PWC) yang bermitra dengan Haryanto Sahari dan Rekan
- c. Ernst & Young (E&Y) yang bermitra dengan Surja, Purwantono, & Suherman.
- d. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang bermitra dengan Siddharta dan Widjaja.

2.3.2 Standar kualitas Audit

Berdasarkan SPAP SA 150 standar *auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.3.3 Indikator Kualitas Audit

Berdasarkan IAPI Nomor 4 (2018) indikator kualitas audit adalah suatu petunjuk kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik melalui KAP yang sesuai dengan kode etik dan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam panduan indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi auditor.
- b. Etika dan independensi auditor.
- c. Penggunaan waktu personil kunci perikatan.
- d. Pengendalian mutu perikatan.
- e. Hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal.
- f. Rentang kendali perikatan.
- g. Organisasi dan tata kelola KAP.
- h. Kebijakan imbalan jasa.

2.4. Kondisi Keuangan

2.4.1 Pengertian Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan menunjukkan bagaimana keadaan dari keuangan perusahaan pada periode tertentu. Gambaran dari kinerja manajemen sebuah perusahaan dan dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut Akbar & Ridwan (2019) kelangsungan usaha dapat diprediksi dengan kondisi keuangan. Dimana selain dapat melihat kondisi keuangan perusahaan, pengguna laporan keuangan juga dapat memprediksi apakah perusahaan tersebut dapat beroperasi dimasa yang akan mendatang.

Menurut Rachma & Nurbaiti (2021) kondisi keuangan perusahaan adalah gambaran kinerja suatu perusahaan yang dapat menggambarkan tingkat kelangsungan usaha, dengan melalui laporan keuangan tahunan dapat melihat kinerja perusahaan tersebut berada dalam kurun waktu atau periode tertentu. Menurut Katrian & Nurbaiti (2021) kondisi keuangan perusahaan merupakan kondisi yang menggambarkan tingkat kelangsungan hidup suatu perusahaan, yang dilihat melalui kondisi keuangan perusahaan, sehingga pihak luar seperti investor dan pemegang saham dapat melihat informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut dalam waktu atau periode tertentu.

Kondisi keuangan menunjukkan bagaimana keadaan sebenarnya dari perusahaan tersebut, apakah dalam keadaan yang baik, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya atau sebaliknya (Maretta *et al.*, 2020). Jika dikaitkan dengan teori agensi, tingginya resiko terhadap permasalahan keuangan maka perlu adanya penilaian terhadap kondisi keuangan agar manajemen perusahaan dapat segera mengambil keputusan dan tindakan. Menurut Ramadhan & Triyanto (2019) kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan harus terlihat melalui laporan keuangan yang terdiri atas perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan mencerminkan kesehatan perusahaan.

2.4.2 Pengukuran Kondisi Keuangan

Metode analisis kondisi keuangan sudah banyak berkembang dan digunakan yang oleh berbagai perusahaan dan berbagai bidang usaha yaitu:

1. *Altman Z-Score*

Metode analisis kondisi keuangan sudah banyak berkembang dan digunakan yang oleh berbagai perusahaan dan berbagai bidang usaha yaitu Altman Z-Score. Menurut

Nasrudin (2022), Edward I. Altman pada tahun 1967 mengukur kerentanan bisnis terhadap kegagalan dengan menggunakan statistik multivariat. Dia menggunakan sistem pembobotan dari lima rasio keuangan utama. Dia kemudian merilis hasilnya pada tahun 1968 sebagai model Altman Z-score pertamanya:

$$\text{Z-Score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5 \text{ (Model 1)}$$

Untuk perusahaan swasta, karena informasi harga saham tidak tersedia, Altman mengganti nilai pasar ekuitas pada variabel X_4 dengan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model Altman Z-Score untuk perusahaan swasta adalah:

$$\text{Z-Score} = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5 \text{ (Model 2)}$$

Untuk Model 2, Z-Score yang bagus untuk perusahaan berada di atas 2,9, menunjukkan peluang bangkrut yang rendah. Sebaliknya, perusahaan berpotensi besar untuk bangkrut jika nilai Z-Score berada di bawah 1,23. Sedangkan, menurut Nasrudin (2022) untuk perusahaan non-manufaktur, menghilangkan variabel X_5 . Persamaan untuk modelnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Z-Score} = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4 \text{ (Model 3)}$$

Untuk Model 3, nilai di atas 2,60 kemungkinan bangkrut sangat kecil dan nilai di bawah 1,10 berarti perusahaan berpotensi besar untuk bangkrut.

Dimana:

a. X_1 : Modal kerja/Total aset (*Working capital/Total assets*)

Modal kerja sama dengan aset lancar minus kewajiban lancar. Rasio ini memberitahu seberapa baik bantalan yang tersedia untuk liabilitas jangka pendek. Jika perusahaan memiliki modal kerja yang relatif tinggi dibandingkan dengan total aset, perusahaan memiliki likuiditas yang relatif baik.

b. X_2 : Laba ditahan/Total aset (*Retained earnings/Total assets*).

Laba ditahan adalah akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Itu merupakan sumber modal internal. Di laporan keuangan, itu di bagian ekuitas pemegang saham. Perusahaan dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan, termasuk untuk melunasi utang. Semakin tinggi rasio, semakin besar modal internal dan semakin kecil perusahaan tergantung pada utang. Jika perusahaan memiliki

sedikit laba ditahan, perusahaan harus mendapatkan modal dari sumber lain, melalui suntikan modal oleh pemegang saham atau utang.

c. X3 : Laba sebelum bunga dan pajak/Total aset (*Earnings before interest and tax atau EBIT/Total assets*).

EBIT memberitahu bahwa laba yang diperoleh perusahaan dari keseluruhan operasinya, sebelum membayar pengeluaran rutin, pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan ke anda profitabilitas, yang mana secara khusus mengukur tingkat pengembalian yang perusahaan hasilkan dari asetnya. Dengan kata lain, jika rasio tinggi, itu menunjukkan perusahaan mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

d. X4 : Nilai pasar ekuitas/Total liabilitas (*Market value of equity/Total assets*).

Rasio ini mengukur solvabilitas perusahaan menggunakan nilai pasar alih-alih nilai buku. Nilai pasar ekuitas sama dengan perkalian antara harga saham perusahaan dengan jumlah saham yang beredar, termasuk saham biasa dan saham preferen. Sedangkan, total aset sama dengan nilai pasar saham dan liabilitas. Jadi, rasio ini memberitahu jumlah ekuitas yang dimiliki terhadap aset yang perusahaan. Semakin tinggi rasio, semakin sedikit perusahaan mengandalkan utang.

e. X5 : Pendapatan/Total aset (*Total sales/Total assets*).

Rasio ini adalah rasio perputaran aset, yakni kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Altman memandang rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi kondisi persaingan. Semakin tinggi rasio semakin baik perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan.

2. *Springate*

Metode ini mempunyai kriteria penilaian jika $Z > 0,862$ maka perusahaan dikategorikan dalam perusahaan yang sehat atau tidak terindikasi kesulitan keuangan. Jika $Z < 0,862$ maka perusahaan dikategorikan ke dalam perusahaan yang gagal atau terindikasi mengalami kesulitan keuangan.

Adapun rumus dalam metode ini ialah :

$$S = 1,03 (A) + 3,07 (B) + 0,66 (C) + 0,4 (D)$$

Keterangan :

1. *Bankruptcy Index (S)*
2. Modal kerja/Total asset (A)
3. Laba bersih sebelum bunga dan pajak/Total aset (B)
4. Laba bersih sebelum pajak/Kewajiban lancar (C)

5. total pendapatan/Total aset

3. *Zmijewski*

Metode ini mempunyai kriteria penilaian jika X bernilai negatif maka perusahaan dikategorikan sehat atau tidak mengalami kesulitan keuangan. Jika X bernilai positif maka perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan gagal atau terindikasi mengalami kesulitan keuangan.

Adapun rumus dalam metode ini ialah :

$$X = -4,3 - 4,5 (X1) + 5,7 (X2) - 0,004 (X3)$$

Keterangan :

1. *Return on Asset (X1)*
2. *Leverage / Debt Ratio (X2)*
3. *Current Ratio/ Likuiditas (X3)*

4. *Foster*

Menurut penelitian (Irman et al., 2022) menyatakan bahwa George Foster dalam bukunya yang berjudul "*Financial Statement Analysis*" melakukan penelitian untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan-perusahaan kereta api di Amerika Serikat periode 1970-1971. Pada awalnya ia menggunakan *Univariate Models* dengan menggunakan dua rasio secara terpisah, yaitu *Transportation Expense to Operating Revenue Ratio (TE/OR Ratio)* dan *Time Interest Earned Ratio (TIE Ratio)*. Karena terdapat kesalahan pada model tersebut *Foster* kemudian mencoba menerapkan sampel perusahaan yang sama untuk dianalisis dengan *Multivariate Models*, yang memiliki kriteria penilaian yang mempergunakan *cut off point Z = 0,640*, sehingga perusahaan yang mempunyai $Z < 0,640$ termasuk dalam kelompok perusahaan yang bangkrut.

Adapun rumus dalam metode ini yaitu:

$$Z\text{-Score} = -3,366 X + 0,657 Y$$

Keterangan:

1. *Transportation Expense / Operating Revenue (X)*
2. *EBIT / Interest Expensive (Y)*

Rasio yang pertama menjelaskan seberapa besar biaya operasi dibandingkan dengan penghasilan, sedangkan rasio kedua menunjukkan seberapa besar laba operasi apabila dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar.

5. *Grover*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irman *et al* (2022), menyebutkan bahwa model *Grover* merupakan model yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman *Z-Score*. Model *Grover* mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan -0,02 ($G \leq -0,02$) sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau sama dengan 0,01 ($G \geq 0,01$). Perusahaan dengan skor di antara batas atas dan batas bawah berada pada *grey area*.

Adapun rumus dalam metode ini ialah :

$$\mathbf{G\text{-}Score = 1,650X1 + 3,404X2 - 0,016ROA + 0,057}$$

Keterangan:

$X1 = \textit{Working Kapital/ Total Assets}$

$X2 = \textit{Earnings before interest and taxes/ Total assets}$

$ROA = \textit{Net Income/ Total Assets}$

2.5. *Good Corporate Governance*

2.5.1 *Pengertian Corporate Governance*

Good corporate governance merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dalam Riadi (2019), *corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan *stakeholders*. Selain itu, Nurdiwaty (2020) menyatakan bahwa *Good corporate governance* adalah sebuah prinsip yang berguna untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan sehingga membantu tercapainya keseimbangan antara kekuatan dan otoritas perusahaan di dalam memberi pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya *shareholder* dan *stakeholder* pada umumnya.

Corporate governance sebagaimana didefinisikan oleh Zafayyad (2022) adalah metode dan proses tata kelola perusahaan dimana perusahaan dijalankan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis. Ini mencakup serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya di perusahaan. *Corporate governance* memberikan struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran

dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik *monitoring* kinerja perusahaan. Dari beberapa penjelasan pengertian *good corporate governance* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah rangkaian proses yang terstruktur atau mekanisme manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha perusahaan. Dengan adanya *good corporate governance*, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai baik oleh investor.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Menurut Suprianto (2022) terdapat lima prinsip dasar *good corporate governance*, sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)
Prinsip ini menegaskan pentingnya kemudahan akses informasi yang mudah dipahami oleh stakeholders (pemangku kepentingan) dengan tetap memperhatikan perlindungan atas informasi yang bersifat rahasia.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Prinsip ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang dilakukan dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Oleh karenanya diperlukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap masing-masing perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Prinsip ini menegaskan pentingnya pengembalian tanggung jawab yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat dan lingkungan untuk menciptakan usaha yang dapat bertahan lama untuk menjadi *good corporate citizen*.
4. Kemandirian (*Independency*)
Prinsip ini menegaskan pentingnya suatu perusahaan dikelola secara independen dalam rangka menciptakan korporasi yang sehat serta pengambilan keputusan yang bersifat objektif guna menghindari konflik kepentingan. Prinsip tersebut dimaksudkan agar masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi atau mengintervensi pihak lain.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menegaskan pentingnya perseroan berfokus pada kepentingan investor dan mitra lainnya atas kewajaran dan kesetaraan yakni tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.4.4 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Good corporate governance merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Menurut Riadi (2019) tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai.
3. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik.
4. Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.
5. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan.

Menurut *Forum for Corporate Governance Di Indonesia (FCGI)* manfaat *good corporate governance* yang dijabarkan dalam penelitian (Murdani & Carolina, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap *stakholder*.
2. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanam modal kembali di Indonesia.
3. Kinerja perusahaan akan memuaskan sekaligus meningkatkan *shareholder* dan deviden.
4. Mempermudah di perolehnya dana pembiayaan sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.

2.4.5 Mekanisme *Good Corporate Governane*

Seperti yang ditunjukkan oleh Sunardi (2019) ada dua mekanisme *good corporate governance*, yaitu mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya:

1. Mekanisme eksternal

Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi:

a. Investor

Menurut Nandy (2022) investor merupakan suatu individu, kelompok atau perusahaan yang menginvestasikan sejumlah modal tertentu. Selain itu, seorang investor biasanya sudah mengantisipasi terhadap kerugian yang akan menimpanya. Oleh sebab itu, seorang investor biasanya akan lebih cermat dalam menghadapi pasar modal atau keadaan dari suatu perusahaan.

b. Auditor

Menurut Himma (2022) auditor adalah seorang akuntan publik yang telah memiliki keahlian dan kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit atas laporan keuangan. Kualitas dan kinerja yang baik dari seorang auditor tentunya akan berhubungan erat dengan reputasi auditor itu sendiri.

c. Kreditur

Menurut Hanifah (2022) kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.

2. Mekanisme internal

Menurut Nurdiwaty (2020) Mekanisme internal dipengaruhi faktor internal perusahaan ditunjukkan pada:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan oleh pihak diluar perusahaan dalam negeri atau pun luar negeri Rachma & Nurbaiti, (2021). Kepemilikan institusional mempunyai peran yang penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham serta dalam memonitor manajemen dikarenakan akan mendorong pengawasan yang lebih optimal. Konflik antara manajemen dengan pemilik perusahaan biasaya terjadi karena lubang informasi yang mereka miliki (*asimetry information*). Konflik ini dapat diminimalisir dengan memperluas tanggung jawab penawaran bagi para pendukung keuangan atau investor. Tanggung jawab dari perusahaan dapat

memajukan mengoptimalkan tingkat pengawasan terhadap manajemen untuk menekan perilaku yang bertentangan dengan tujuan perusahaan (Saraswati, 2021).

b. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari dewan komisaris (Katrian & Nurbaiti, 2021). Menurut Surat Edaran Bapepam SE-03/PM/2000 serta Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep- 315/BEJ/06/2000 disebutkan bahwa komite audit minimal terdiri dari tiga anggota, satu orang sebagai komisaris independen yang juga merangkap ketua komite audit dan dua anggota lain sebagai pihak ektern yang independen, dimana tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan yang mana salah satunya harus memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi dan keuangan.

c. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan, terutama dalam hal penerapan GCG. Dimana Dewan komisaris memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan strategi perusahaan, selain itu juga dalam pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan serta pelaksanaan akuntabilitas. Dalam tugas mengawasi jalannya perusahaan, dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit. Peningkatan nilai perusahaan dan pencapaian kinerja perusahaan merupakan hasil yang diharapkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite. Menurut Sondokan *et al* (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi.

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu jumlah keseluruhan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen aktif, yang dimaksud yaitu manajemen yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan (direksi dan komisaris) ataupun keseluruhan modal yang ada dalam perusahaan. Agatha *et al* (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

2.6. Ukuran Perusahaan

2.6.2 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat menggolongkan perusahaan besar, menengah, dan kecil. Menurut Susana (2019), Ukuran perusahaan dapat dilihat pada total aktiva perusahaan dan dengan menggunakan total aktiva dimaksudkan untuk memperoleh ukuran perusahaan. Total aktiva menunjukkan kekayaan perusahaan sehingga ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aktiva. Menurut Santosa dan Wedari (2007: 146): “Menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil.” Perusahaan besar biasanya berkembang dan beroperasi dengan baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit *going concern* cenderung tidak diberikan pada perusahaan besar. Hasil penelitian Minerva *et al* (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi opini audit *going concern*.

2.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Syabania *et al*, (2020) ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan kecil (*small firm*)
Jika aset antara Rp.50.000.000 sampai Rp.500.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000.
2. Perusahaan menengah (*medium firm*)
Apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000
3. Perusahaan besar (*large firm*)
Jika aset lebih dari Rp.10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari Rp.50.000.000.000.

2.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan

Menurut Situmeang & Julianti (2019) terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ukuran perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Ruang lingkup usaha.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.
3. Besarnya resiko kepemilikan.
4. Batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan.
5. Besarnya investasi yang telah ditanamkan.
6. Cara pembagian keuntungan.
7. Jangka waktu berdirinya perusahaan.
8. Peraturan-peraturan pemerintah.

2.6.4 Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai nilai, seperti dengan total aktiva, total penjualan, total modal, total laba dan yang lainnya, nilai tersebut yang dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Menurut Riadi (2020) indikator ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Ukuran perusahaan = Ln Total Aset

Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya perusahaan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi produktivitas perusahaan.

2. Ukuran perusahaan = Ln Total Penjualan

Agar bisnis mencapai tujuannya untuk menghasilkan keuntungan, penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini akan membuat laba perusahaan berkembang yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Menurut Riadi (2020), pengukuran ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung dari:

1. Total asset,
2. Investasi,
3. Perputaran modal,
4. Alat produksi,
5. Jumlah pegawai,
6. Keluasan jaringan usaha,
7. Penguasaan pasar,

8. Output produksi,
9. Besaran nilai tambah,
10. Besaran pajak terbayarkan, dan seterusnya yang ternyata menjadi bahwa korporasi memang identik dengan perusahaan besar.

Menurut Riadi (2020), ukuran perusahaan juga dapat ditentukan oleh beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tenaga kerja
Tenaga kerja merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer terdaftar yang bekerja di perusahaan pada waktu tertentu.
2. Tingkat penjualan
Volume penjualan selama periode tertentu waktu disebut tingkat penjualan.
3. Total hutang
Total hutang merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode waktu tertentu.
4. Total aktiva
Total aktiva yang merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada waktu tertentu.

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan, *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern*. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang penulis telah kumpulkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Panggah Wira Angkasa, Dewi Indriasih, dan Baihaqi Fanani (2018)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance, Opinion Shopping, Kualitas Audit, Dan Audit Client Tenure Terhadap Penerimaan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen dan audit <i>client tenure</i> berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . Sedangkan Kepemilikan institusional, komite

		Opini Audit <i>Going Concern Auditing</i>	audit, <i>opinion shopping</i> , kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>
2	Rivaldi Akbar, Ridwan (2019)	Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Reputasi KAP Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan Reputasi KAP tidak memengaruhi penerimaan opini audit <i>going concern</i> . Ukuran perusahaan dan Pertumbuhan perusahaan memengaruhi penerimaan opini audit <i>going concern</i>
3	Lydia Minerva, Vivian Savenia Sumeisey, Stefani, Stepheny Wijaya, Cindy Agrippina Lim (2020)	Pengaruh Kualitas Audit, <i>Debt Ratio</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Audit Lag</i> terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> . <i>Debt ratio</i> dan <i>Audit lag</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . Kualitas audit, <i>debt ratio</i> , ukuran perusahaan, <i>audit lag</i> secara simultan berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .

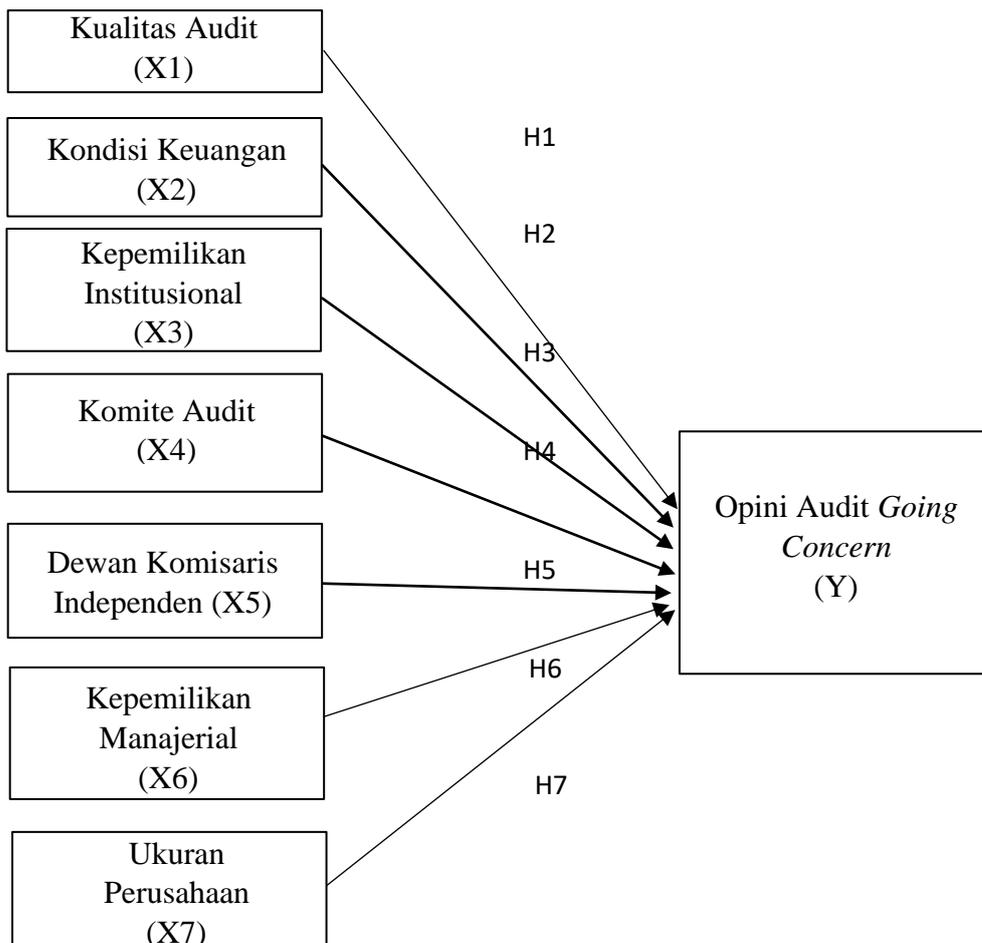
4	Anis Lila Mareta, Rispanyo dan Djoko Kristianto (2020)	Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .
5	Muhammad Fakhrizal Hamid (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance, Leverage</i> dan Kualitas Audit terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, <i>leverage</i> dan kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .
6	I Gusti Ayu Agung Omika Dewi dan Ni Made Niki Premashanti (2020)	Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik, Keberadaan Komite Audit, dan <i>Prior Opinion</i> terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> .	Hasil menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . Komite audit dan <i>prior opinion</i> berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>
7	Ristania Adinda Katrian dan Annisa Nurbaiti (2021)	Pengaruh Komite Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap	Secara simultan komite audit, kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap

		Opini Audit <i>Going Concern</i> .	penerimaan opini audit <i>going concern</i> . Secara parsial, kondisi keuangan perusahaan berpengaruh dengan arah positif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> , sedangkan komite audit dan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .
8	Yocky Sarada Putra, Rina Asmeri dan Meriyani (2021)	Pengaruh Kualitas Audit, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .
9	Ayu Winda Afrida Rachma dan Annisa Nurbaiti (2021)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Disclosure Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> , sedangkan variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, <i>disclosure</i> tidak berpengaruh

			terhadap opini audit <i>going concern</i> .
--	--	--	---

2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam tinjauan pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9. Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh kualitas audit terhadap opini audit *going concern*

Dalam teori agensi, teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memberikan opini audit *going concern*. Ketika pernyataan *going concern* dikeluarkan oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four*, maka pihak eksternal memiliki keyakinan terhadap

opini yang dikeluarkan. Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik seperti *big four* akan berusaha menjaga nama baik dan menghindari tindakan yang akan merugikan nama baik KAP. Karena auditor tersebut dianggap memiliki lebih banyak keterlibatan untuk memprediksi *going concern* auditor bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan yang menjadi dasar keputusan mereka. Dalam hal ini auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini audit berdasarkan kelangsungan hidup perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Juanda & Lamury, 2021) dan (Putra et al., 2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.9.2 Pengaruh kondisi keuangan terhadap opini audit *going concern*.

Pada teori agensi menyatakan bahwa *shareholders* selaku pemilik perusahaan (*principal*) akan selalu memantau kinerja manajer (*agen*). Salah satu yang dilakukan oleh *principal* untuk menilai kinerja agennya adalah melalui audit dengan auditor yang profesional dan independen. Menurut Rachma & Nurbaiti (2021) kondisi keuangan perusahaan adalah gambaran kinerja suatu perusahaan yang dapat menggambarkan tingkat kelangsungan usaha, dengan melalui laporan keuangan tahunan dapat melihat kinerja perusahaan tersebut berada dalam kurun waktu atau periode tertentu. Rasio keuangan digunakan untuk menggambarkan situasi ini, dan mereka dapat memberikan informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dalam hal ini kondisi keuangan perusahaan yang disampaikan melalui laporan keuangan dapat menjadi pertimbangan bagi para auditor untuk melihat

keberlangsungan perusahaan (*going concern*) perusahaan di kemudian hari. Penelitian yang dilakukan oleh Maretta *et al* (2020) menunjukkan bahwa kondisi keuangan mempengaruhi opini audit *going concern*. Kegiatan operasional suatu perusahaan akan terganggu ketika mengalami kondisi keuangan yang buruk yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingginya risiko yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan perusahaan cenderung tidak menerima opini audit *going concern* jika keuangannya dalam kondisi baik. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kondisi keuangan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

2.9.3 Pengaruh *good corporate governance* terhadap opini audit *going concern*.

a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap opini audit *going concern*.

Adanya kepemilikan dari institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan lebih optimal. Menurut teori keagenan, kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang besar terhadap manajemen perusahaan, sehingga perilaku menyimpang manajemen dalam mementingkan keperluan pribadi agen tanpa memikirkan kesejahteraan prinsipal. Semakin besar saham yang dimiliki oleh investor institusional, maka bertambah besar juga dorongan institusional sebagai pengawas manajemen perusahaan. Hal tersebut mampu memberikan dampak yang besar bagi kinerja perusahaan yang dapat mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan sehingga mengurangi resiko kesulitan keuangan dan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachma & Nurbaiti (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

b. Pengaruh komite audit terhadap opini audit *going concern*.

Komite audit adalah sejumlah orang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dari BAPEPAM, dimana terdiri dari paling sedikit tiga orang guna untuk membantu dewan komisaris dengan tugas utamanya melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Dewi & Premashanti, 2020). Dalam hal pengendalian komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komite Audit pihak yang ditugaskan untuk pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas transparansi dan kredibilitas laporan keuangan entitas. Anggota komite audit dengan latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan akan lebih efektif mengawasi pelaporan keuangan dan memberikan laporan keuangan berkualitas tinggi. Sehingga semakin besar proporsi komite audit berlatar belakang akuntansi dan keuangan maka semakin kecil kemungkinan pemberian opini audit *going concern* untuk kedepannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Premashanti (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Komite audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

c. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap opini audit *going concern*

Dewan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. menurut Nurdiwaty (2020) dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan, terutama dalam hal penerapan *good corporate governance*. Secara teori dan praktik berdasarkan teori agensi, tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan, serta meninggalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat menjamin transparansi dalam laporan keuangan perusahaan dan mengarahkan konsistensi perusahaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga semakin besar proporsi komisaris independen dapat mengurangi kemungkinan pemberian opini audit *going concern*. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya *et al* (2021) menemukan bahwa dewan komisaris mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* perusahaan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

d. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap opini audit *going concern*.

Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan, sehingga kepemilikan manajerial ini dapat mensejajarkan kedudukan antara manajer dengan pemegang saham. Dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham kepemilikan manajerial dapat membantu mengatasi masalah keagenan dari manajer. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal menjalankan efektivitas siklus bisnis secara efisien dan menjaga keberlangsungan perusahaan, sehingga kecil peluang auditor untuk memberikan opini audit *going concern*, maka dapat diasumsikan semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan semakin tinggi pengawasan manajer terhadap pengelolaan perusahaan. Jika nilai perusahaan meningkat, maka auditor akan mengeluarkan opini yang baik, yang dapat meningkatkan reputasi auditor itu sendiri, sehingga meningkatkan nilai saham yang ada, sehingga meningkatkan dan menarik pemegang saham mayoritas, minoritas dan investasi baru. Pernyataan tersebut sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid & Fidiana (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

2.9.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern*

Dalam teori agensi yaitu perusahaan dengan ukuran besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar, karena ukuran perusahaan yang semakin besar menimbulkan kekhawatiran oleh principal (pemegang saham). Hal ini dapat dilihat melalui definisi ukuran perusahaan, ukuran perusahaan umumnya berpengaruh pada penilaian investor dalam membuat keputusan investasi. Auditor beranggapan bahwa perusahaan besar akan lebih memiliki kemampuan menyelesaikan kondisi keuangannya dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki peluang untuk menerima opini audit *going concern*. Semakin besar ukuran perusahaan semakin baik pengelolaan terhadap dana investasi. Menurut Minerva *et al* (2020) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penjelasan diatas adalah:

H6: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.